

LAPORAN HASIL SURVEI ORIENTASI BISNIS PERBANKAN OJK (SBPO)

—

TRIWULAN II - 2025

Dalam pelaksanaan *surveillance* perbankan, dibutuhkan informasi lebih mendalam, baik kuantitatif dan kualitatif, untuk melihat sinyal awal perubahan prospek/orientasi kegiatan bisnis bank. Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) dilaksanakan kepada Bank Umum pertama kali pada Triwulan III-2019 setiap triwulan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah/tendensi bisnis perbankan pada triwulan mendatang. SBPO menghasilkan suatu Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP), yaitu indeks komposit yang menunjukkan persepsi dengan rentang nilai 1 s.d. 100, di mana indeks >50 menunjukkan persepsi optimis, indeks =50 menunjukkan persepsi stabil, dan indeks <50 menunjukkan persepsi pesimis. IBP terdiri dari tiga subindeks yaitu Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR) dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK).

Selain IBP, SBPO juga menghasilkan proyeksi beberapa indikator baik makroekonomi maupun Perbankan. Berdasarkan perbandingan antara hasil survei dan realisasi secara historis terlihat bahwa SBPO cukup dapat memprediksi arah dari beberapa indikator baik makroekonomi maupun perbankan di Indonesia.



Hasil SBPO TW II - 2025 Menunjukkan Persepsi yang Optimis

Secara keseluruhan, hasil SBPO triwulan II-2025 menunjukkan persepsi yang optimis. Hal ini tecermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan II-2025 yang berada pada zona optimis di level 59, meskipun sedikit menurun dari level 60 pada triwulan I-2025. Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi terhadap berlanjutnya peningkatan intermediasi dan keyakinan bahwa bank cukup mampu mengelola risiko di tengah tantangan kondisi makroekonomi global dan domestik.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)

Triwulan II-2025

KETERANGAN	Q1'25	Q2'25
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	53	34
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	55	58
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	74	85
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	60	59

Sumber: SBPO TW II 2025, diolah

IBP TW II -
2025
59

Jumlah responden SBPO TW II - 2025



Porsi Aset responden dari total aset Bank Umum di Indonesia



Komponen Pembentuk IBP

A. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan II-2025 berada pada level pesimis dengan indeks sebesar 34 menurun dari 53 pada triwulan I-2025. Pesimisme kondisi makroekonomi pada triwulan II-2025 disebabkan oleh prediksi akan melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi dan melemahnya nilai tukar.

PDB diperkirakan akan tumbuh menurun dari realisasi triwulan I-2025 sebesar 4,87% (yoy). Penurunan pertumbuhan PDB didorong oleh perkiraan menurunnya konsumsi masyarakat pasca bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri pada triwulan I-2025. Selain itu, peningkatan fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akan semakin membatasi daya beli masyarakat yang juga masih lemah sehingga konsumsi rumah tangga juga akan semakin terbatas.

Selanjutnya, adanya kenaikan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) dapat menekan ekspor sektor manufaktur. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan PDB pada triwulan II-2025, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Indonesia per April 2025 telah menurun menjadi 46,7 yang juga

menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia berada dalam zona kontraksi.

Seiring dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini, The Fed diperkirakan masih akan mempertahankan *Federal Funds Rate* (FFR) untuk menahan inflasi yang mungkin meningkat seiring dengan kebijakan kenaikan tarif impor yang diterapkan oleh AS. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil *Federal Open Market Committee* (FOMC) meeting Mei 2025, The Fed mempertahankan suku bunga pada range 4,25%-4,50%. Sedangkan BI-Rate diperkirakan menurun didorong oleh rendahnya inflasi serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

Inflasi pada Juni 2025 diperkirakan meningkat dari realisasi inflasi Maret 2025 sebesar 2,48% (yoy). Perkiraan peningkatan inflasi tersebut utamanya didorong oleh proyeksi kenaikan harga kebutuhan pangan dan berakhirnya berbagai insentif yang diberikan oleh Pemerintah seperti diskon tarif listrik. Akibat dari pelemahan rupiah dan

pelonjakan harga tersebut diprediksi dapat mengakibatkan peningkatan imported inflation.

Selanjutnya, nilai tukar Rupiah terhadap USD diperkirakan melemah dari Rp16.588/USD (kurs tengah 27 Maret 2025) Keyakinan tersebut utamanya didorong oleh

ketidakpastian global yang meningkat dan adanya kebijakan kenaikan tarif oleh Presiden AS yang memicu perang tarif dan volatilitas perdagangan global sehingga mendorong pelemahan nilai tukar mata uang negara berkembang (*emerging market*).

IKM

diwakili ekspektasi responden terhadap PDB, BI-Rate, laju Inflasi, dan kurs IDR/USD

B. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan II-2025 masih cukup terjaga dan terkendali. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 58 yang berada di zona optimis meningkat dari triwulan sebelumnya. Seiring dengan penyaluran kredit yang diperkirakan meningkat, bank tetap melakukan *monitoring* dan penagihan nasabah kredit bermasalah serta pelaksanaan restrukturisasi dan hapus buku untuk mengantisipasi dan menekan peningkatan NPL. Responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan II-2025 akan membaik dari 2,17% pada posisi Maret 2025. Namun demikian, masih terdapat potensi peningkatan NPL yang berasal dari pemburukan kredit restrukturisasi Kol 1 dan Kol 2, seiring dengan menurunnya kondisi usaha debitur dikarenakan perekonomian yang belum stabil.

Selanjutnya, risiko pasar diperkirakan relatif terjaga antara lain karena perbankan menjaga PDN pada level rendah dan berada pada posisi *long* serta NIM yang diproyeksikan meningkat. Berdasarkan data aktual, rasio PDN per Maret 2025 sebesar 1,30% atau masih pada level rendah, jauh di bawah *threshold* 20%. Selanjutnya, NIM diperkirakan meningkat seiring proyeksi peningkatan penyaluran kredit dan penurunan biaya penghimpunan dana seiring dengan telah turunnya BI-Rate pada Januari 2025. Berdasarkan hasil survei, NIM diproyeksi lebih tinggi dibandingkan realisasi NIM per Maret 2025 sebesar 4,51%.

Risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga dan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong ekspektasi "alat likuid (kas dan setara kas)" perbankan yang masih akan tumbuh. Sejalan dengan hal tersebut, hingga Maret 2025 rasio AL/NCD masih jauh di atas *threshold* 50% yaitu sebesar 116,05%

IPR

diwakili persepsi/ekspektasi responden terhadap NPL/NPF, NIM, PDN, dan *net cash-flow*

C. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan II-2025 melanjutkan optimisme dari triwulan sebelumnya dengan IEK sebesar 85, meningkat dari 74 pada triwulan I-2025. Optimisme kinerja perbankan didorong oleh ekspektasi pertumbuhan DPK dan penyaluran kredit yang berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan. Optimisme pertumbuhan kredit di tengah gejolak ekonomi didorong dengan usaha bank dalam melakukan ekspansi dan peningkatan kredit agar sesuai dengan target Rencana Bisnis Bank (RBB). Selanjutnya, peningkatan permintaan kredit dari masyarakat dan masih adanya *pipeline* kredit yang dimiliki oleh bank juga diyakini dapat menjadi pendorong pertumbuhan kredit pada Triwulan II-2025. Selanjutnya, responden memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit hapus buku diperkirakan cenderung menurun. *Undisbursed Loan* juga diperkirakan cenderung stabil seiring dengan

kecenderungan masyarakat yang juga masih berhati-hati di tengah gejolak kondisi makroekonomi. Kredit restrukturisasi diperkirakan menurun seiring dengan membaiknya kinerja debitur.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan II-2025, DPK juga akan tumbuh sejalan dengan usaha bank dalam memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit dan menjaga likuiditas, serta adanya dana pemerintah yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang akan masuk pada bank daerah pada Triwulan II-2025. Kenaikan DPK diperkirakan akan lebih didorong terutama oleh deposito. Lebih lanjut, suku bunga DPK diperkirakan cenderung stabil dibandingkan triwulan I-2025 meskipun BI-Rate diperkirakan menurun. Hal ini sejalan dengan usaha bank untuk dapat meningkatkan dana murah.

IEK

diwakili persepsi/ekspektasi responden terhadap pertumbuhan kredit, DPK, laba, dan permodalan bank

ANECDOTAL INFORMATION

Berdasarkan hasil survei pada triwulan II-2025, diperoleh informasi terkait beberapa isu sebagai berikut:

a. Outlook Ekonomi Global dan Indonesia Tahun 2025 dengan Melihat Perkembangan Kondisi Ekonomi Saat Ini

International Monetary Fund (IMF) melalui *World Economic Outlook* (WEO) April 2025 merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi sebesar 2,8%, turun dari proyeksi pada WEO Januari 2025 yaitu sebesar 3,3%. Sejalan dengan revisi proyeksi tersebut, berdasarkan hasil SBPO juga diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat. Hal ini didorong oleh ketidakpastian kondisi global seiring dengan masih cukup tingginya tensi geopolitik antara Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, serta ketegangan perang dagang akibat penetapan kebijakan tarif baru impor oleh AS pada April 2025. Perang dagang berpotensi mengganggu kegiatan ekspor impor, menghambat aktivitas investasi, dan dapat meningkatkan inflasi global yang berujung pada penurunan tingkat konsumsi. Peningkatan inflasi juga dapat berdampak pada proyeksi penurunan *Federal Funds Rate* (FFR) yang relatif dapat tertahan di tahun 2025.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 juga direvisi ke bawah pada WEO April 2025 yaitu menjadi diperkirakan tumbuh 4,7% dari 5,1%. Proyeksi tersebut didorong oleh proyeksi perlambatan ekonomi global yang juga akan berdampak pada Indonesia. Adanya perang dagang yang terjadi mengakibatkan volatilitas di pasar keuangan global, mendorong pergerakan arus modal yang tidak stabil, serta menurunkan minat investor terhadap aset berisiko di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia sehingga terjadi capital outflow. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Penanaman Modal Asing di Indonesia pada Triwulan I-2025 sebesar Rp230,4 triliun atau terkontraksi -6,27% (qtq) dari Triwulan IV-2024.

Selanjutnya *capital outflow* tersebut juga dapat mengakibatkan pelemahan nilai tukar Rupiah. Lebih lanjut, pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi sejak 2024 juga masih berlangsung yang turut mendorong proyeksi melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

b. Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Sejak tahun 2024 hingga saat ini pelemahan daya beli masyarakat masih terus berlangsung. Kondisi daya beli masyarakat saat ini dipengaruhi oleh kombinasi tekanan struktural dan siklus ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan pendapatan yang melambat. Berdasarkan data BPS, rata-rata gaji bulanan bersih di Indonesia hanya tumbuh 1,78% (yoy) pada Februari 2025 lebih rendah dari 3,27% (yoy) pada Februari 2024. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah PHK sejak Januari hingga April 2025 telah mencapai 24.036 atau telah mencapai 30,83% dari total PHK tahun 2024. Menurunnya pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat tersebut juga mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan menabung. Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang meningkat juga menjadi faktor melemahnya daya beli masyarakat.

Kebijakan kenaikan tarif atas barang impor oleh AS, diperkirakan dapat ikut menekan daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan, kebijakan tersebut dapat mengakibatkan gangguan rantai pasok dan mendorong kenaikan harga barang impor. Ketika barang impor yang dibutuhkan sebagai bahan baku dan barang konsumsi menjadi lebih mahal, maka beban biaya akan naik dan pada akhirnya diteruskan ke konsumen. Ini dapat memicu kenaikan harga barang-barang pokok dan kebutuhan rumah tangga, yang menekan daya beli, terutama kelompok menengah-bawah. Beban biaya yang naik juga akan menekan pendapatan korporasi. Penurunan kinerja perusahaan kemudian dapat berdampak pada pembatasan ekspansi, pengurangan kompensasi, atau bahkan PHK, terutama di sektor manufaktur. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menekan pendapatan rumah tangga dan memperlemah daya beli masyarakat.

Bagi bank, fenomena melemahnya daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank terutama bagi bank yang memiliki basis nasabah UMKM yang kuat. Melemahnya daya beli masyarakat adalah akibat dari menurunnya pendapatan di tengah peningkatan harga barang kebutuhan pokok. Hal ini menekan masyarakat dalam menggunakan dananya

untuk konsumsi maupun menabung. Tekanan ini juga membuat masyarakat semakin sulit dalam membayar kewajiban kredit. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank. Selain itu penyaluran kredit juga dapat melambat seiring turunnya permintaan kredit dari masyarakat utamanya kredit konsumsi akibat pendapatan yang menurun. Penurunan daya beli juga berdampak pada penghimpunan dana bank karena kemampuan masyarakat untuk menabung turut berkurang. Melemahnya daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian khusus, karena apabila kondisi ini berlangsung cukup lama, maka perbankan harus bekerja lebih keras untuk menjaga margin dan efisiensi, serta menyesuaikan strategi penyaluran kredit agar tetap menysasar sektor-sektor yang lebih resilien. Secara keseluruhan, pelemahan daya beli tidak hanya berdampak pada permintaan kredit dan simpanan, tapi juga pada arah pengelolaan risiko dan strategi pertumbuhan bank ke depan. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat segera menerapkan kebijakan yang dapat memperbaiki daya beli masyarakat agar fenomena ini tidak berlangsung lebih lama.

c. Kebijakan Kenaikan Tarif atas Barang Impor oleh Amerika Serikat (AS)

Presiden AS, Donald Trump telah mengumumkan kenaikan tarif atas barang impor dari beberapa negara termasuk Indonesia pada April 2025. Meskipun dilakukan penundaan atas implementasi tarif tersebut, namun demikian apabila diterapkan nantinya kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko kredit terhadap sektor perbankan melalui penurunan permintaan kredit baru maupun meningkatnya risiko gagal bayar. Berdasarkan hasil survei diperoleh bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi yang akan sangat terdampak apabila kebijakan tersebut diterapkan yaitu antara lain Industri Pengolahan utamanya pada industri pengolahan tekstil dan elektronik, Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Selain dapat menimbulkan risiko kredit, kenaikan tarif atas barang impor yang akan diterapkan oleh AS juga dapat menimbulkan risiko pasar pada bank diantaranya melalui suku bunga dan *yield* surat berharga. Kebijakan tarif atas barang impor oleh AS menyebabkan ketidakpastian global akibat kekhawatiran para investor terhadap kebijakan kenaikan tarif atas barang impor tersebut yang selanjutnya dapat menyebabkan peningkatan *capital outflow* karena investor cenderung memilih aset yang lebih tidak berisiko seperti *safe haven investment* seperti emas, US treasury, dan lainnya. Kondisi tersebut akan meningkatkan *yield* surat berharga serta

menekan peningkatan suku bunga acuan untuk mencegah berlanjutnya arus keluar dan meningkatkan daya tarik aset dalam negeri.

Menghadapi kemungkinan risiko kredit yang dapat muncul tersebut, bank telah menyiapkan beberapa strategi antara lain:

1. Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sektor-sektor yang paling terdampak.
2. Melakukan *monitoring* dan *review* berkala terhadap portfolio kredit terutama yang berorientasi ekspor impor.
3. Penyaluran kredit secara selektif terutama kepada sektor ekonomi yang lebih resilience dari dampak kenaikan tarif.
4. Melakukan *stress test* secara rutin dengan memperhitungkan berbagai skenario dengan memperhatikan lebih seksama nasabah yang masuk dalam kategori *watchlist*.
5. Memastikan kecukupan cadangan kredit dan meningkatkan *coverage ratio* NPL terutama untuk sektor-sektor yang terpapar langsung dengan dampak kebijakan kenaikan tarif atas barang impor.

Sedangkan untuk kemungkinan risiko pasar, bank memitigasi dengan beberapa strategi berikut:

1. Memelihara posisi devisa neto minimal.
2. Melakukan *hedging* terhadap eksposur yang rentan terhadap volatilitas pasar global.
3. Mengurangi penempatan pada surat berharga jangka panjang termasuk melakukan *rebalancing* posisi dalam portfolio AFS.
4. Memantau kondisi pasar uang dan pasar modal untuk mengantisipasi fluktuasi suku bunga maupun likuiditas yang bisa dipicu oleh ketegangan dagang global.

d. **Peluang Perbankan di tengah Isu Global dan Domestik**

Di tengah gejolak kondisi ekonomi global dan domestik saat ini, terdapat peluang yang dapat diambil oleh perbankan Indonesia. Beberapa peluang yang dapat diambil oleh bank antara lain:

1. Melakukan ekspansi penyaluran kredit selektif pada sektor ekonomi terutama sektor yang lebih resilien dari dampak global. Pendanaan yang tepat sasaran pada sektor tersebut dapat mendukung kemandirian ekonomi dan menciptakan stabilitas lapangan kerja.

2. Meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan pendampingan dan penawaran pinjaman bagi perusahaan yang memiliki kemampuan teknologi atau efisiensi untuk bersaing dengan produk impor.
3. Depresiasi Rupiah terhadap mata uang regional dan global justru menciptakan peluang ekonomi baru, khususnya pada sektor-sektor berbasis devisa, seperti pariwisata dan layanan kesehatan. Indonesia menjadi lebih menarik bagi wisatawan mancanegara utamanya untuk tujuan rekreasi. Hal ini membuka peluang besar bagi perbankan untuk menyediakan layanan transaksi lintas negara, payment gateway, pembiayaan fasilitas pariwisata dan rumah sakit swasta, serta solusi remitansi yang efisien dan terintegrasi.
4. Akselerasi transformasi digital. Perubahan perilaku konsumen membuka ruang luas untuk pengembangan layanan perbankan digital end-to-end, termasuk mobile banking, pembiayaan digital untuk UMKM, hingga pengembangan ekosistem digital lintas industri yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih inklusif dan efisien.

